

**KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KELURAHAN LEMPAKE
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

Alda Lia Dwi Yanti, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Kerjasama Antar Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.

Pengarang : Alda Lia Dwi Yanti

NIM : 1702015047

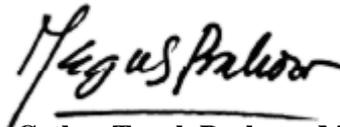
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul

Samarinda, 29 Juni 2024

Pembimbing,



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.
NIP. 19741120 200501 1 001**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 12	
Nomor : 4	
Tahun : 2024	
Halaman : 1077-1086	

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Alda Lia Dwi Yanti ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan atau mengetahui gambaran kerjasama antar pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian kerjasama antar pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir yaitu meliputi, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama penanggulangan bencana banjir, pembagian tugas dan tanggung jawab, bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama, pola komunikasi, pengambilan keputusan. Sumber data primer dari penelitian ini antara lain yaitu key informan adalah Camat Samarinda Utara, Lurah di Kelurahan Lempake Samarinda Utara, dan anggota BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, serta Informan lainnya yaitu Ketua RT yang terdampak banjir dan Masyarakat yang terdampak banjir. Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang kaya akan wawasan mengenai pertanyaan atau permasalahan yang ingin diatasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Temuan menunjukkan bahwa kerjasama antar pemerintah sangat diperlukan untuk menangani bencana banjir di Desa Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, dalam upaya gotong-royong antara Pemerintah, Kelurahan, Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat. Selain itu ada faktor penghambat di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara yaitu masih belum jelasnya pola komunikasi dalam internal pemerintahan itu sendiri, kondisi geografis dan posisi wilayah yang di lewati aliran juga menjadi kendala saat melakukan proses penanggulangan bencana banjir.

Kata Kunci : *Kerjasama Pemerintah, Penanggulangan Banjir.*

Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi, ketika lahan kering (bukan rawa) terendam air maka terjadilah banjir, akibat topografi wilayah serta curah hujan yang tinggi tersebut yang merupakan daratan rendah. Jika diperhatikan kejadian yang ada dilapangan sangat terlihat dampak akibat

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: aldaliadwiyanti9@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

yang ditimbulkan oleh banjir yaitu, seperti banyaknya korban jiwa, harta benda yang hilang, rumah penduduk yang mengalami kerusakan serta sekolah - sekolah dan bangunan untuk sosial, serta prasarana untuk jalan, dan prasarana untuk lainnya, dan terganggunya transportasi jalan. Banjir juga disebabkan oleh pembangunan perkotaan yang tidak terkendali, bertentangan dengan perencanaan wilayah dan ramah lingkungan, sehingga mengurangi daerah aliran sungai dan sumber daya air. Pada saat yang sama, drainase perkotaan yang tidak memadai karena kerusakan pada sistem drainase, masih belum maksimalnya infrastruktur drainase, serta berkurangnya kepedulian terhadap lingkungan juga dapat menimbulkan masalah lain.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa tindakan pengurangan bencana terhadap masyarakat di daerah rentan merupakan pelaksanaan kegiatan mitigasi. Mitigasi merupakan kombinasi tindakan untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesadaran fisik dan meningkatkan kemampuan merespons ancaman berbahaya. Area risiko melalui studi risiko menghitung nilai kerentanan, dan nilai risiko. Untuk itu kawasan rawan bencana banjir Kota Samarinda perlu diupayakan khususnya di Kecamatan Samarinda Utara di Kelurahan Lempake perlu strategi penanganan banjir berbasis Pencegahan Bencana digalakkan baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dapat terhindar dari bencana, meskipun bencana tidak dapat dihindari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dari uraian di atas yaitu, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu untuk mengurangi resiko bencana, perlu adanya pemahaman dan persiapan terhadap masyarakat dan pemerintah yang terkena dampak banjir. Oleh karena itu pemerintah sudah berkewajiban melayani masyarakatnya agar terhindar dari ancaman bencana banjir.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Handoko (2012:8) mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan anggota suatu organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Siswanto (2021:1) Menyatakan bahwa manajemen merupakan seni serta ilmu dalam merencanakan, mengorganisir, memotivasi, serta mengarahkan orang-orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Terry dalam Nawawi (2013:54), dapat disimpulkan bahwa terdapat empat fungsi manajemen yang dikenal oleh masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

- a. Fungsi Perencanaan (*Planning*) Perencanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menentukan tujuan organisasi, merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana kerja

organisasi yang terperinci. Semua tahapan dalam perencanaan dilakukan secara teliti dan matang untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*) Pengorganisasian adalah kumpulan kegiatan yang diperlukan, yaitu pendefinisian struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab setiap unit, serta status dan sifat hubungan antar setiap unit.
- c. Fungsi Pengarahan (*Actuating*) Pengarahan merupakan upaya untuk menggerakkan para anggota suatu organisasi atau perusahaan agar mau dan berusaha mencapai maksud dan tujuan perusahaan secara optimal.
- d. Fungsi Pengendalian (*Controlling*) Arti pengendalian merupakan proses menentukan sesuatu yang telah dicapai, mengukur kemuadian mengoreksi kegiatan dalam melaksanakan dan jika perlu di ambil tindakan perbaikan agar dalam pelaksanaannya tetap berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa manajemen adalah segala sesuai sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara efektif dan efisien.

Pemerintah dan Pemerintahan

Astomo (2014: 403) menyatakan bahwa Pendekatan analitis untuk memeriksa perbedaan antara pemerintahan dan pemerintahan, baik secara teoritis maupun praktis. Istilah pemerintahan digunakan untuk menggambarkan administrasi dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah, sedangkan pemerintah adalah entitas atau mekanisme yang mengelola operasi pemerintah. Organ atau aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan menjalankan berbagai kebijakan serta program pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu cabang kekuasaan eksekutif. Menurut Pamudji (2014: 405) menyatakan bahwa Pemerintahan secara umum adalah proses pemerintahan melalui badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan pemerintah nasional. Dalam arti sempit, pemerintahan mengacu pada cara organ eksekutif beserta anggotanya memerintah diri sendiri untuk mencapai tujuan pemerintahan nasional. Dalam arti sempit, tata kelola juga mencakup jajaran dan organ eksekutif yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tata kelola negara (tujuan nasional).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah adalah badan atau organisasi yang memegang pengaruh pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Kerjasama

Menurut Domai dalam Pranata et al (2015:1789) menyatakan bahwa kerjasama melibatkan interaksi dinamis antara dua pihak atau lebih untuk

mencapai tujuan bersama. Sedangkan Johnson dalam Wulandari et al (2015:12) menyatakan bahwa kerjasama adalah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Kerjasama merupakan ketidak mampuan masyarakat untuk mengintergrasikan kerjasama ke dalam kehidupan sehari-hari merupakan fenomena sosial. berbagai metode pembelajaran telah muncul di sektor pendidikan yang lebih focus pada kolaborasi.

Taylor, Gari dalam Muchsin (2018:27) menyatakan bahwa kerjasama antar kota dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kerjasama yaitu:

- a. Biaya untuk kontrak layanan (*Service Agreements*)
Pelayanan tersebut meliputi air minum bersih, listrik, dan sumber daya lainnya, dengan sistem kompensasi berbasis biaya dan jangka waktu yang disepakati.
- b. Pengusahaan bersama (*Joint Agreements*)
Pada hakikatnya model ini memerlukan partisipasi atau peran serta dari daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik.
- c. Pembentukan otoritas bersama (*Jointly-Formed Authorities*)
Pembentukan otoritas bersama yaitu merupakan pengendalian, pengelolaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah terkait pada badan gabungan yang biasanya mencakup perwakilan dari pemerintah daerah.
- d. Badan daerah (*Regional Bodies*)
Sistem ini bertujuan untuk membentuk suatu kewenangan bersama yang mengatur mata pelajaran umum melebihi mata pelajaran daerah. Organisasi-organisasi seperti ini sering kali bersifat netral dan biasanya tidak memiliki wewenang untuk berpartisipasi langsung dalam meningkatkan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa kerjasama adalah ketika seseorang atau sekelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan yang pada dasarnya sama. Bentuk kerjasama ini berkembang ketika masyarakat berusaha untuk memperoleh manfaat bagi semua guna mencapai tujuannya dan merupakan bagian dari hakikat kehidupan bermasyarakat.

Manajemen Bencana

Nurjanah dalam Ferdiansyah et al (2020:71) menyatakan bahwa manajemen bencana suatu disiplin ilmu yang menyelidiki bencana dan korelasinya dengan manajemen bencana, khususnya dalam bidang pencegahan dan penanganan. Sedangkan Kusumasari dalam Ferdiansyah et al (2020:71) menyatakan bahwa manajemen bencana mencakup seluruh tahapan perencanaan tanggap bencana, termasuk operasi sebelum dan sesudah bencana, serta pengelolaan bahaya dan dampak negatif yang terkait dengan bencana. Perencanaan, struktur, dan pengorganisasian manajemen bencana melibatkan koordinasi dan penanganan kebutuhan darurat di seluruh pemerintahan, relawan, sektor swasta, dan lain-lain melalui berbagai cara.

Penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu kegiatan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan

masyarakat dan mempunyai banyak arah. Undang-undang dan aturan dirujuk mencakup peraturan multidisiplin. Dengan kata lain kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara sektoral, sedangkan kegiatan lembaga penanggulangan bencana sebagian besar bersifat koordinasi berbasis sektoral.

Definisi Konsepsional

Kerjasama antar pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, kecamatan, kelurahan dan RT untuk menanggulangi atau mengatasi bencana banjir dengan berkoordinasi dalam penyusunan rencana kerja serta kesiap siagaan dalam menghadapi bencana banjir yang akan datang. Kerjasama ini dimulai dari berkoordinasi antar pihak warga, pihak RT, Kecamatan dan pihak Kelurahan dimana apabila sudah melakukan koordinasi maka semua pihak yang terlibat akan menganalisa keadaan bencana yang ada dilapangan. Dimulai dari mensurvei lokasi yang mengalami bencana banjir atau bencana alam. Apabila sudah melakukan survei maka dari pihak-pihak tersebut bisa mendapatkan solusi untuk melaksanakan rencana kerja tersebut.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Sumber data ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan dari *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini yaitu: Camat Samarinda Utara, Lurah di Kelurahan Lempake, dan BPBD. Informan yaitu ketua RT yang terdampak banjir, dan masyarakat. Pertanyaan dan jawaban dasar, serta wawancara tatap muka yang mengikuti pedoman wawancara tertentu, digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Observasi, wawancara (secara berkala), dokumentasi, dan triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan model data interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al (2020: 8) sebagai teknik analisis datanya. Komponen analisis data adalah memadatkan data, menyajikan data, serta merumuskan dan memverifikasi kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kerjasama Penanggulangan Bencana Banjir

Stoner & Freeman dalam Ramdani (2015:387) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses menggabungkan tujuan dan fungsi berbagai unit atau bagian suatu organisasi untuk mencapai kesatuan tindakan untuk proses pencapaian bersama. Sedangkan Terry dalam Ramdani (2015: 386) menyatakan bahwa Koordinasi adalah sinkronisasi teratur upaya-upaya individu sesuai dengan kuantitas, waktu, dan tujuan sehingga tindakan secara simultan dapat diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lempake seperti

BPBD, pihak Kecamatan serta pihak Kelurahan tetapi tidak melibatkan masyarakat. Setiap instansi yang terlibat juga memiliki peran masing-masing dalam memaksimalkan proses kerjasama. Sedangkan untuk pihak instansi lainnya seperti pihak kecamatan dan juga pihak kelurahan biasanya berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi dan musyawarah dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang dapat mempercepat proses penanganan banjir di wilayah mereka.

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penanganan wilayah banjir cenderung berasal dari pihak instansi atau pihak pemerintahan tanpa melibatkan masyarakat. Dari hal tersebut dapat kita lihat jika keterlibatan aktor dalam kerjasama antar pemerintah polanya bersifat hubungan vertikal dalam pemerintah kota. Dinas yang memiliki eselon lebih tinggi dari camat kemudian camat sebagai pemimpin kecamatan melibatkan lurah dan RT karena merupakan sub koordinat dari kecamatan. Pola hubungan kerjasama yang dari atas kebawah dan bawah ke atas atau vertikal dinilai cenderung lebih efektif daripada pola hubungan yang berpola horizontal yang cenderung sejajar.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab antar Pihak dalam Penanggulangan Bencana Banjir (peran masing-masing pihak)

Amran dalam Bakti & Fadlurrahman (2020:172) menyatakan bahwa Pengurangan risiko banjir merupakan suatu pendekatan yang tujuan utamanya adalah untuk secara sistematis mengurangi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap bencana, yang merupakan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh pemerintah. Dalam hal ini, pengurangan risiko bencana harus dipimpin oleh pemerintah dengan partisipasi berbagai pihak. BPBD sebagai lembaga komando penanggulangan bencana pusat mempunyai perwakilan di setiap daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Banjir Provinsi dan Kabupaten (BPBD).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk tugas dan tanggung jawab antar pihak dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara di kerjakan bersama-sama antara pemerintah dan juga masyarakat dan tidak ada tugas khusus. Namun ada sebagian mengatakan bahwa tugas yang dilakukan ada tugas khusus misalnya dari walikota yang mengarahkan langsung untuk melakukan tugas penanggulangan bencana. Pihak pemerintah biasanya melakukan pengusulan kegiatan melalui musrenbang dan pihak masyarakat melakukan pengusulan kegiatan melalui kegiatan Prodebaya.

Pihak pemerintah maupun pihak masyarakat memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Masing-masing pihak telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peran yang dimiliki masing-masing. Kegiatan kerjasama yang cenderung bergotong royong dan kegiatan diskusi yang didasari oleh musyawarah di anggap lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Kelurahan Lempake.

Bentuk Kegiatan yang dilakukan dalam Kerjasama

Domain dalam Pranata et al., (2015:1789) menyatakan bahwa Kerja sama antar pemerintah adalah proses yang digunakan oleh satu atau lebih pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, pemerintah, atau pemecah masalah. Sedangkan Domain dalam Pranata dkk (2015:1789) mengatakan kerjasama berarti adanya dua kelompok atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam satu waktu. Dalam definisi tersebut, tiga unsur utama yang diperhatikan dalam kerangka kolaborasi adalah unsur dua kelompok atau lebih, unsur interaksi dan unsur satu proyek, dapat diasumsikan ada jika sesuatu dipelajari. Tidak ada kerja sama dalam hal itu.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk kegiatan yang di lakukan dalam kerjasama antar pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dapat berupa perbaikan drainase bersama agar distribusi air menjadi lancar. Ada juga kegiatan pemberian batuan berupa makanan pokok bagi masyarakat yang terdampak banjir, serta pendistribusian air bersih agar masyarakat yang terdampak juga memiliki stok untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Di wilayah Lempake, tidak ada perjanjian tertulis untuk kerja sama antar pemerintah dan perjanjiannya tidak terikat. Model kerjasama ini didasarkan pada kepercayaan politik dan kepercayaan antar daerah peserta. Kerja sama jenis ini lebih efisien dan mudah dalam pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang mengikat bagi pemerintah mana pun.

Pola Komunikasi

Ramdani (2014:388) mempunyai tiga kategori penanggulangan bencana dan kekuatannya masing-masing, yaitu sebelum bencana peran BPBD adalah koordinasi dan pelaksanaan, pada keadaan darurat, koordinasi, komando dan pelaksanaan, dan setelah bencana yaitu koordinasi dan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, pola komunikasi yang di lakukan yaitu pemerintah kelurahan dan kecamatan selaku pihak yang lebih mengetahui prediksi cuaca dan prediksi banjir akan mengumumkan dan memberitahukan serta memberikan peringatan kepada masyarakat apabila debit air sudah berada pada titik rawan bahaya, kemudian setelah terjadi banjir atau pasca banjir masyarakat memberikan informasi kepada pemerintah apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat untuk memulihkan kondisi serta keadaan pasca terjadi bencana banjir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup serangkaian inisiatif antara lain penetapan kebijakan pembangunan rawan bencana, tindakan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan pemulihan. Tujuan pencegahan bencana adalah untuk mengurangi risiko terjadinya bencana.

Pengambilan Keputusan

Sharma Pratiwi & Nugrohoseno (2014:68) menyatakan bahwa salah satu indikator mengukur kerjasama yaitu pengambilan keputusan kooperatif. Proses

pengambilan keputusan adalah hak secara bersama-sama yang dilakukan secara musyawarah dalam suatu organisasi atau kelompok, jadi dengan adanya musyawarah maka suatu masalah bisa dipecahkan atau melakukan suatu tindakan yang ingin dituju atau yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu, pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara musyawarah. Cara musyawarah dilakukan karena pemerintah dan masyarakat menganggap cara ini lebih efektif karena keputusan yang di ambil nantinya merupakan hasil kesepakatan bersama. Musyawarah dan metode diskusi kolaboratif lainnya adalah cara yang baik untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan bersama. Diharapkan dalam perundingan tersebut akan tercapai kesepakatan. Konsensus berarti persetujuan dengan suara bulat. Semua peserta dapat menyetujui perjanjian tersebut dan tidak ada seorangpun yang dapat menolaknya.

Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan terpenting dalam proses politik. Namun, implementasi seringkali dianggap sebagai satu-satunya implementasi keputusan pemerintah. Namun pada kenyataannya, tahap implementasi sangatlah penting karena suatu kebijakan tidak akan membuahkan hasil jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi adalah tahapan dimana kebijakan dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan pengembangan kebijakan dapat tercapai. Jika Anda ingin mencapai apa yang diharapkan secara politik. Jadi implementasi adalah syarat mutlak.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan yaitu, hambatan dalam implementasi penanggulangan bencana banjir adalah pemerintah di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara beberapa hal harus sangat diperhatikan seperti yang pertama masih minimnya peralatan dan personil dalam proses evakuasi, kedua adalah pola komunikasi yang kurang efektif, serta yang ketiga adalah pemerintah masih belum bisa meyakinkan warga bahwa kondisi harta benda yang di tinggalkan masih dalam pengawasan pihak keamanan dan belum bisa memastikan keadaan kondusif sehingga warga masih banyak yang tidak bersedia di evakuasi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk kerjasama antar pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara bersifat koordinatif dan bergotong royong antara Pemerintah Kelurahan, kelompok Rukun Tangga dan masyarakat. Terkadang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kota Samarinda. Kerjasama ini tidak didasari dengan perjanjian kerjasama karena didasari dengan sukarela atau tanpa mengharapkan imbalan,

dan tidak terlepas dari aktivitas tolong menolong Untuk lebih jelasnya di sampaikan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama (koordinasi) Penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lempake seperti BPBD, pihak Kecamatan serta pihak Kelurahan, tetapi tidak melibatkan masyarakat.
 - b. Dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lempake kegiatannya dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan juga masyarakat. Bentuk kegiatan yang di lakukan berupa perbaikan drainase bersama, kegiatan pemberian batuan berupa makanan pokok, serta pendistribusian air bersih.
 - c. Pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan biasanya melakukan pengusulan kegiatan untuk meminimalkan banjir seperti pembangunan saluran air melalui musrenbang dan pihak masyarakat melakukan pengusulan kegiatan melalui kegiatan Probabaya.
 - d. Pola komunikasi yang di lakukan yaitu masyarakat melaporkan kepada pihak RT kemudian RT melanjutkan laporan ke kelurahan dan di teruskan kepada pihak kecamatan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara musyawarah dan masyarakat menganggap cara ini lebih efektif karena keputusan yang di ambil nantinya merupakan hasil kesepakatan bersama.
 - e. Pengambilan keputusan yaitu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara musyawarah.
2. Faktor penghambat dalam kerjasama yang di hadapi dalam kerjasama penanggulangan bencana banjir yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Lempake di Kecamatan Samarinda Utara yaitu masih belum jelasnya pola komunikasi dalam internal pemerintah itu sendiri, masih minimnya peralatan dan personil dalam proses evakuasi, kondisi geografis dan posisi wilayah yang di lewati aliran juga menjadi kendala saat melakukan proses penanggulangan bencana banjir.

Saran

Dari Kesimpulan penelitian ini penulis sampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya agar lebih responsif terhadap masyarakat sehingga penanggulangan yang di lakukan tidak harus menunggu laporan dan keluhan dari masyarakat terlebih dahulu dan proaktif untuk bergerak mengatasi masalah jika memang terdapat kendala pada masyarakat.
2. Masyarakat dapat lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami dengan jelas petunjuk mengenai layanan online. Hal ini dilakukan agar proses pelayanan dan pengiriman dapat berjalan secara efisien dan efektif.
3. Pihak pemerintah sebaiknya selalu mengecek kondisi di setiap rumah yang terdampak agar bisa mengetahui kondisi harta benda yang ada didalam rumah sehingga bisa meyakinkan masyarakat bahwa harta benda mereka dalam keadaan aman.
4. Pemerintah harus memberikan evakuasi tempat yang aman kepada masyarakat.

Evakuasi sangat penting dilakukan ketika terjadinya bencana atau peristiwa lain yang berbahaya.

Daftar Pustaka

- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 401–420. <https://jurnal.usk.ac.id>
- Bakti, V. A., & Fadlurrahman. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo Coordination of Regional Disaster Management Agencies in Di. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 171–183. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1594>
- Ferdiansyah, Sugiarti, C., & Attahahara, H. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol 11 No 2. 67–78. <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i2.160>
- Handoko, Hani T. (2012). *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Muchsin, S. (2018). Kerjasama Antar Pemerintahan (Intergovernmental Relation). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol 9 No 1. 22–31.
- Nawawi, Zaidan. (2013). *Manajemen Pemerintah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Pranata, A., Saleh, S., & Iman, H. (2015). Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Pada Kerja Sama Kota Malang dengan Kota Batu dan Kota Malang dengan Kabupaten Malang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 3 No 10. 1787–1791. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1045>
- Pratiwi, W. K., & Nugrohoseno, D. (2014). Pengaruh Kepribadian terhadap Kerjasama Tim dan Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, Vol 7 No 1. 1–72. <https://doi.org/10.26740/bisma.v7n1.p63-72>
- Ramdani, E. M. (2015). Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 12 No 3. 383–406. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/50>
- Siswanto, Bedjo (2012). *Pengantar Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wulandari, B., Arifin, F., & Irmawati, D. (2015). Peningkatan Kemampuan Kerjasama dalam Tim Melalui Pembelajaran Berbasis Lesson Study. *Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Vol 1 No 1. 9–16. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i1.12816>